

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan (Wahyu dan Yuliadi: 2013).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses terjadinya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Arsyad (2004), pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Sejak terjadinya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan perekonomian daerah masing-masing. Daerah tersebut semakin memiliki kebebasan untuk mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan penduduk lokal (Nehen, 2010).

Dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya tentu suatu negara memerlukan peningkatan dalam bidang ekonomi dengan mengembangkan seluruh aspek yang ada dalam negara tersebut sehingga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pemerataan distribusi pendapatan. Peningkatan perekonomian negara tentu menjadi idaman bagi setiap negara di dunia ini karena dengan meningkatnya perekonomian nasional maka pendapatan per kapita rakyatnya pun juga ikut meningkat. Dalam mencapai hal tersebut

haruslah pertumbuhan perekonomian nasional lebih besar dari pertumbuhan penduduk suatu negara.

Persoalan Pertumbuhan Ekonomi (*economic growth*) telah mendapat perhatian yang besar, sejak munculnya ilmu ekonomi. Menurut Nanga (2005), pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup (*standard of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Kata lain, kemampuan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat bergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya (*long run rate of economic growth*). Tapi menurut Senghaas (1988), yang menentukan bukanlah pertumbuhan itu sendiri; yang menentukan adalah dampak perluasan pertumbuhan dan sejauh mana dapat terbentuk perekonomian yang koheren dengan adanya dorongan pertumbuhan sektoral. Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1992).

Dalam perekonomian terbuka ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di DIY, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk DIY namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global (Wahyudin dan Yuliadi: 2013).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu (BPS, 2014).

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2015 (persen)

Tahun	Kabupaten/Kota				
	Kulonprogo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
2010	3,06	4,97	4,15	4,49	5,4
2011	4,95	5,27	4,33	5,19	5,48
2012	5,01	5,34	4,84	5,45	5,52
2013	5,05	5,57	5,16	5,7	5,12
2014	4,37	5,08	4,54	5,41	4,46
2015	4,64	5,00	4,81	5,31	5,16

Sumber : BPS, DIY

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa nilai Pertumbuhan Ekonomi memiliki perbedaan antara kabupaten/kota yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi pada tahun 2015 di Kabupaten Sleman sebesar 5,31 % sementara Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 5,16 % dan Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 5,00 %, kemudian di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sebesar 4,81 % sedangkan di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2015 sebesar 4,64 %.

Investasi dalam perekonomian merupakan motor penggerak yang dapat memperluas kapasitas produksi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peran investasi di samping dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi juga sekaligus dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja. Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi, investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun di samping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Yuliadi: 2009).

(Sukirno, 2010) investasi diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, sehingga investasi disebut juga dengan penanaman modal.

Kuncoro (2004) mengatakan bahwa dalam kondisi persaingan daerah yang cukup tajam, pemerintah memiliki beban tugas yang harus dilaksanakan yaitu menyiapkan daerahnya sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi. Ada beberapa hal yang berpengaruh dalam investasi, investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan investasi domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi asing. Investasi dari sektor asing dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Rustiono, 2008). Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal terdiri dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing. Baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang merupakan salah satunya mengandalkan investasi sebagai landasan utama bagi pertumbuhan ekonominya selain sektor pariwisata. Investasi yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengalokasikan dana berbagai proyek pembangunan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Dimana investasi swasta berbentuk PMA dan PMDN serta investasi masyarakat lainnya. Sejalan dengan itu bermacam-macam kebijakan diterapkan untuk mempermudah masuknya investasi swasta maupun asing di DIY

Tabel 1.2

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing tahun 2014 menurut Kabupaten/Kota di DIY

Kabupaten/Kota	PMDN	PMA
Kulonprogo	378.474	498.512
Bantul	253.292	249.910
Gunungkidul	35.503	123.524
Sleman	1.349.718	2.890.039
Yogyakarta	1.551.559	2.193.868

Sumber : BKPM Yogyakarta

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah realisasi penanaman modal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman modal di DIY terlihat masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk mengangkat potensi unggulan di 5 kabupaten/kota tersebut dan mempromosikannya kepada calon investor potensial, kabupaten Gunungkidul adalah kabupaten yang memiliki jumlah penanaman modal paling rendah sejumlah 35.503 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY. Hal ini disebabkan karena investor tidak begitu tertarik. Investor akan cenderung memilih menginvestasikan modalnya pada perusahaan suatu badan usaha yang berpotensi menghasilkan laba.

Perbaikan iklim penanaman modal sangat penting, karena dengan perbaikan ini investasi yang tinggi akan menambahkan produktivitas barang dan jasa. Teori Harrod-Domar (1939) (dalam Hasana, 2016) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasinya rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan rendah.

Todaro (2000) mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju imigrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut UU No 13 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 2 Tentang Ketenagakerjaan mengemukakan "*Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat*". Pada dasarnya tenaga kerja merupakan modal sumber daya manusia untuk pertumbuhan dan perbaikan suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak positif dan dampak negatif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Peningkatan penduduk menyebabkan bertambahnya tingkat tenaga kerja, sedangkan peningkatan penduduk yang tidak sepadan dengan tingkat kesempatan kerja akan berakibat tingginya tingkat pengangguran yang tercipta. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kulonprogo	211.069	203.425	218.042	124.860	236.536	232.190
Bantul	468.822	472.076	488.773	261.409	488.734	495.235
Gunungkidul	372.189	358.807	414.815	223.535	424.669	386.458
Sleman	531.929	561.894	544.438	319.589	590.080	567.286
Yogyakarta	191.139	202.393	201.640	104.053	216.024	210.049

Sumber : BPS, DIY

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, jumlah penduduk yang bekerja terbanyak di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 590.080 orang, disusul oleh Kabupaten Gunungkidul sebanyak 424.669 orang, kemudian disusul oleh Kabupaten Kulonprogo sebanyak 236.536 orang, dan di Kota Yogyakarta sebanyak 216.024 orang, sedangkan di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebanyak 495,235 orang dan jumlah penduduk yang bekerja terendah berada di tahun 2013 di Kota Yogyakarta sebanyak 104.053 orang.

Aloysisus (dalam Lincolin Arsyad, 2010) mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi perkembangan manusia melalui tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Gaisha (1993) mengatakan bahwa pendidikan pada diri seseorang dapat meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dan menggunakan informasi dan memperoleh pemahaman akan perekonomian serta memberikan pilihan apakah seseorang ingin menjadi konsumen, produsen atau menjadi warga negara biasa. Secara tidak langsung pendidikan juga

berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan pribadi seseorang dengan cara meningkatkan produktivitas sehingga akan mencapai standar hidup yang lebih baik.

Tabel 1.4

Rata-rata Lama Sekolah menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (persen)

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kulonprogo	8,37	8,20	8,20	8,37	8,20	8,40
Bantul	8,92	8,82	8,95	8,95	8,74	9,08
Gunungkidul	7,70	7,65	7,70	7,79	6,45	6,46
Sleman	10,51	10,30	10,52	10,55	10,28	10,30
Yogyakarta	11,52	11,48	11,56	11,56	11,56	11,41

Sumber: BPS, DIY

Dari tabel 1.4 dapat diketahui bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan yang signifikan di setiap tahunnya. Dilihat menurut Kabupaten/Kota selama periode tersebut Kabupaten Gunungkidul mempunyai indeks pendidikan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,45. Sedangkan indeks tertinggi berada di Kota Yogyakarta sebesar 11,56 pada tahun 2012 dan 2013. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul terendah dibandingkan empat Kabupaten/Kota lainnya dan yang tertinggi berada di Kota Yogyakarta.

Faktor pembatas dari pertumbuhan ekonomi adalah Sumber Daya Alam (SDA), apabila sumber daya alam tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin tentu yang berperan penting dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM). Apabila sumber daya alam dapat dimanfaatkan sepenuhnya maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Faktor tenaga kerja bukanlah kendala dalam proses produksi nasional sedang faktor kapital adalah faktor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi sehingga dalam proses pertumbuhan dibutuhkan peranan akumulatif kapital.

Peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015”**

1.2 Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup pertumbuhan ekonomi daerah sangat luas maka penulis membatasi pembahasan masalah. Penelitian ini terbatas pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhi investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan hasil yang dapat diambil manfaatnya sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah dan lembaga terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi masukan serta bahan pertimbangan dalam rangka penentuan arah dan kebijakan dalam pembangunan ekonomi.
2. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik, serta dapat menerapkan teori-teori yang telah didapatkan untuk digunakan sebagai bekal ketika terjun ke masyarakat.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian dengan judul yang sejenis.